

## Potret Beban Pendidikan Siswa dan Orangtua dalam Menghadapi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi

Kristina Dwi Handayani<sup>a,1</sup>, Hipolitus Kristoforus Kewuel<sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Brawijaya, Indonesia

<sup>1</sup> kristinadwi72@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 2 Juli 2023;

Revised: 12 Juli 2023;

Accepted: 18 Juli 2023.

Kata kata kunci:

Pendidikan;

Penerimaan Peserta Didik  
Baru;

Peran Orang Tua;

Motivasi belajar siswa.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengungkap upaya orangtua dan siswa serta dampaknya dalam menghadapi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. Metode yang digunakan adalah metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi menyisakan persoalan psikologis bagi orangtua dan calon siswa. Mereka yang selama ini sudah terlanjur membangun dikotomi sekolah favorit dan non-favorit terpaksa harus berjuang melawan diri sendiri untuk menghilangkan image tersebut sekaligus menata diri terutama diri anak-anak untuk menerima dan bersahabat dengan sekolah yang memenuhi kriteria zonasi. Bagi anak-anak yang berhasil dalam perjuangan ini, mereka tidak terganggu dalam proses pembelajaran, tetapi bagi anak-anak yang gagal dalam perjuangan ini, mereka terganggu dalam proses pembelajaran, bahkan hingga menghilangkan motivasi belajar mereka. Demikian pula orangtua, bagi yang berhasil beradaptasi, mereka bisa menjadi sumber kekuatan bagi proses belajar anaknya, sebaliknya bagi yang gagal beradaptasi, selain mereka tidak bisa menjadi sumber motivasi bagi anaknya, mereka juga menjadi pihak yang terus menerus mempersoalkan kebijakan zonasi.

---

### ABSTRACT

*Portrait of the Educational Burden on Students and Parents in Facing the Policy of New Student Admission Based on Zoning.* This research aims to uncover the efforts of parents and students and their impacts in facing the New Student Admission System based on zoning. The method used in this research is ethnographic. The results indicate that the zoning-based New Student Admission policy leaves psychological issues for both parents and prospective students. Those who have already established a dichotomy between favorite and non-favorite schools are compelled to struggle against themselves to eliminate this perception and, at the same time, to prepare themselves, especially the children, to accept and befriend schools that meet the zoning criteria. For children who succeed in this endeavor, their learning process remains undisturbed. However, for those who fail in this endeavor, they encounter disruptions in the learning process, leading to a loss of motivation in their studies. Similarly, parents who successfully adapt to the changes can become a source of strength for their children's learning process. On the other hand, those who fail to adapt not only become unable to motivate their children but also continually question the zoning policy.

---

Copyright © 2023 (Kristina Dwi Handayani & Hipolitus Kristoforus Kewuel) All Right Reserved

How to Cite : Handayani, K. D., & Kewuel, H. K. (2023). Potret Beban Pendidikan Siswa dan Orangtua dalam Menghadapi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Pedagogi : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 49–59. <https://doi.org/10.56393/pedagogi.v3i2.1683>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan bekal untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas (Kewuel, 2017). Dalam hal ini diperlukan manajemen pendidikan yang terstruktur, efektif, dan efisien. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung hal tersebut. Sebagai tahap awal, pemerintah telah memiliki peta penjenjangan pendidikan, yakni Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) /Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini menyorot aturan pemerintah terkait kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kejuruan di setiap jenjang pendidikan itu. Sebelumnya diterapkan dua jalur PPDB yaitu jalur prestasi dengan melihat Nilai Ujian Nasional (NUN), dan jalur yang memperhitungkan Nilai Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (LHBDP). Adanya prasyarat untuk memilih sekolah yang dilihat berdasarkan nilai tersebut menciptakan sebuah pola di masyarakat terkait penilaian sekolah yang 'baik' atau 'tidak baik'. Dengan pola-pola ini, sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan cara menerima siswa-siswa yang berkualitas. Sekolah bagaikan ajang perlombaan sehingga memunculkan ketimpangan sosial di masyarakat. Sekolah yang baik dan berbiaya tinggi hanya untuk calon siswa ekonomi kelas atas dan demikian sebaliknya. Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat dan memicu munculnya stigma 'sekolah favorit' dan 'sekolah tidak favorit'.

Hal di atas menjadi salah satu pemicu perubahan peraturan PPDB. Pelaksanaan PPDB saat ini sudah tidak lagi menjadikan NUN dan LHBDP sebagai acuan atau prioritas utama diterimanya calon siswa. Saat ini PPDB terbagi menjadi 4 jalur penerimaan, yakni jalur Zonasi, jalur Prestasi, jalur Afirmasi, dan jalur Mutasi. Penelitian ini lebih menekankan pada PPDB Jalur Zonasi. Peraturan terkait PPDB jalur zonasi dapat dikatakan sebuah model baru dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan untuk pertama kalinya seluruh proses penerimaan peserta didik sepenuhnya menggunakan teknologi. Dengan demikian, kebijakan baru ini menciptakan sebuah masyarakat informasi dan digital di mana penentuan lokasi sekolah calon siswa dapat dilakukan secara digital. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat memberikan perwujudan nyata bahwa ia tidak hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti komunikasi, mobilitas, dll, melainkan juga sebagai alat untuk meningkatkan mutu kehidupan (quality of life) di mana calon siswa dan juga orangtuanya tidak bisa melakukan pembohongan soal tempat tinggal demi mendapat sekolah yang diinginkan (Habibah, 2017).

Sistem zonasi ini mengharuskan calon siswa menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya atau yang berdomisili satu kecamatan dengan sekolah yang dituju (Putsanra, 2019). Zonasi dilihat berdasarkan perhitungan jarak domisili ke sekolah yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi geolokasi atau Google Maps. Hal tersebut mengharuskan calon peserta didik untuk memilih sekolah yang terdekat dengan kecamatan tempat tinggalnya sesuai dengan zona yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah secara khusus memang telah menetapkan aturan zonasi ini demi mewujudkan pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Surat edaran Kemendikbud ini diedarkan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia untuk menjalankan proses pendidikan jenjang SD-SMP-SMA/MA/SMK sesuai ketetapan dari Pemerintah Pusat (Kemendikbud, 2019). Dalam konteks, PPDB Zonasi menimbulkan beban baru yang dirasakan oleh siswa dan orangtua, kesenjangan pendidikan yang tadinya ingin dihapus dengan kebijakan ini, ternyata malah muncul kesenjangan atau beban dalam bentuk lain. Tulisan ini menjelaskan mengenai hal-hal teknis dalam dunia pendidikan di Indonesia yang kerap kali mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Inilah alasan peneliti memilih topik ini. Penelitian ini akan melihat secara sekilas bagaimana realita yang ada di lapangan terkait dengan kebijakan PPDB Jalur Zonasi.

Reed-Danahay (1996) menceritakan tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Perancis, di mana pemerintah memegang kendali penuh atas pengaturan pendidikan di sana. Penulis bercerita

---

mengenai strategi dan sudut pandang keluarga dan sekolah lokal terhadap pendidikan. Deborah membahas dengan rinci bagaimana strategi pendidikan keluarga di sana. Strategi pendidikan keluarga didasari oleh latar belakang dan strata sosial yang dimiliki, dalam hal ini pengambilan keputusan apapun ditentukan oleh berbagai habitus yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga tersebut.

Yuristia (2017) menjelaskan tentang hubungan antara pendidikan dan dinamika sosial budaya. Dalam hal ini Yuristia menerapkan analisis ilmiah guna memahami fenomena pendidikan dalam hubungannya dengan perubahan sosial-kebudayaan, modernisasi, dan pembangunan. Penulis membahas pentingnya pendidikan yang memandang bahwa peserta didik merupakan agent of change di masyarakat. Pendidikan juga merupakan gerbang menuju ke dunia modern karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung perubahan sosial budaya.

Bintoro (2018) membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat Sekolah Menengah Atas Tahun ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. Penelitian Bintoro dan penelitian ini memiliki persamaan dalam menjelaskan sudut pandang tenaga pengajar dan masyarakat (orangtua siswa). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Bintoro adalah metode penelitiannya. Bintoro menggunakan metode penelitian penjelasan (explanatory) dan menggunakan metode snowball sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan metode etnografi.

Penelitian ini menggunakan teori Theodore Bramled (Tilaar, 1999) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan erat dikarenakan keduanya sama-sama bersinggungan dengan nilai-nilai (Kewuel, 2014). Dengan demikian, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan karena hal tersebut hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Bourdieu (2017) menjelaskan bahwa modal sosial dan modal budaya juga memiliki peran yang sangat penting dalam kajian masalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertumpu pada proses belajar-mengajar, rentetan kurikulum, dan evaluasi kemampuan siswa dalam menyerap materi yang diajarkan. Peserta didik juga mempunyai kesempatan yang berbeda dalam mengakses Pendidikan karena perbedaan ekonomi maupun sosial budayanya.

Lokasi dalam penelitian ini di Kota Malang, dan berfokus pada siswa di sekolah SMPN 15 Malang. Mayoritas siswa yang sekolah di sana ialah siswa yang tinggal di Bandulan, yang mana Bandulan merupakan daerah yang cukup di pinggir kota dan berbatasan dengan Kabupaten Malang, yaitu Wagir. Lokasi ini dianggap tepat karena memiliki jarak yang cukup jauh dengan sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Harapannya penelitian ini bisa mengungkap sebesar apa upaya siswa untuk mencapai sekolah lanjutan yang dianggapnya bagus. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan orangtua dan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Peneliti ini mengungkap sejauh mana usaha yang sudah dilakukan baik oleh peserta didik maupun orangtua untuk mengambil keputusan sekolah mana yang akan menjadi tujuan belajar calon siswa.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan dua tahapan, yakni menjelang PPDB dibuka. Observasi berupa pengamatan terhadap kegiatan komunitas pendidikan yakni proses belajar mengajar di sekolah, sosialisasi dan proses belajar mengajar secara daring karena saat penelitian ini dilakukan adalah masa transisi dari pandemi ke endemi. Peneliti juga melakukan observasi terhadap keluarga siswa. Hal tersebut guna untuk memahami bagaimana pola interaksi di lingkup sekolah secara online serta strategi dan usaha orangtua dalam menghadapi sistem pendidikan saat ini. Dalam hal ini peneliti mengikuti kegiatan informan secara langsung dalam menjalankan perannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi partisipan atau etnografi pada siswa, orangtua dan salah satu guru di SMPN 15 Malang serta wawancara mendalam terhadap informan yang telah

ditentukan berdasarkan dua cara, yakni secara bertatap muka langsung dan via WhatsApp dan Instagram. Selain itu juga penelitian ini menggunakan studi pustaka beberapa referensi yang berkaitan tentang PPDB. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, yakni dengan mereduksi data untuk mencari bagian-bagian pentingnya sesuai dengan pembatasan masalah dalam penelitian ini.

### **Hasil dan pembahasan**

PPDB merupakan sebuah tahapan yang harus dilalui oleh calon siswa untuk menempuh pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/MA/SMK. Peraturan terkait dengan PPDB ini telah diperbarui dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2021. PPDB mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Permendikbud No.51 tahun 2018 dan Permendikbud No.20 Tahun 2019 PPDB jalur zonasi memiliki prosentase yang sangat tinggi. PPDB jalur zonasi harus dijalankan minimal 80%, jalur prestasi maksimal 15%, jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5% dari total pagu yang dibuka. Dalam surat edaran terbarunya Permendikbud No. 44 Tahun 2019, terdapat beberapa pembaharuan.

(1). Jalur Zonasi, dengan kuota minimal 50% dari pagu/daya tampung sekolah. Jalur ini penerimaannya menggunakan sistem Geolokasi. (2). Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Kuota jalur ini sebesar minimal 15% dari pagu/daya tampung sekolah. Meskipun demikian, jalur ini tetap memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan dalam proses penerimaannya. (3). Jalur mutasi atau perpindahan tugas orangtua/wali dengan kuota maksimal sebesar 5%. Tidak berbeda dengan sebelumnya, penentuan penerimaan peserta didik dalam jalur ini juga memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah tujuan. (4). Jalur prestasi adalah jalur yang menggunakan nilai raport peserta didik di sekolah sebelumnya. Prestasi yang dimaksudkan dapat berupa prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang paling singkat diterbitkan 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Peraturan PPDB mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dilakukan setelah mempelajari beragam implementasi PPDB di lapangan dalam tingkat pemerintah daerah, mulai dari Permendikbud PPDB terdahulu (Permendikbud No.51 Tahun 2018 dan Permendikbud No.20 Tahun 2019). Pelaksanaan PPDB di daerah mengalami beberapa evaluasi dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan di lapangan seperti pemetaan usia anak sekolah yang sedang mengikuti PPDB, jumlah pagu/daya tampung di sekolah, serta jumlah sekolah yang berbeda-beda di setiap kecamatannya. Dengan demikian sangat sulit jika PPDB jalur zonasi tetap dilaksanakan dengan persentase yang tinggi. Itulah yang menjadi alasan diturunkannya persentase PPDB jalur zonasi. Nilai rapor dan Nilai Ujian Nasional akan menjadi pertimbangan kedua setelah melalui tahapan zonasi dari sekolah. Apabila hanya tinggal tersisa satu kursi dan jumlah pendaftar melebihi satu, pihak sekolah bisa menyeleksi berdasarkan nilai ujian dan rapor yang terbaik. Akan tetapi, sekolah tidak bisa menentukan batas minimal nilai ujian dan nilai rapor dalam melakukan seleksi.

Adanya sistem ini mengharuskan peserta didik untuk memilih sekolah di zona yang memiliki radius terdekat dengan domisilinya. Di Kota Malang sendiri pembagian zona untuk SMA terbagi menjadi 3 zona seperti tahun ajaran sebelumnya 2019-2020 dan masih sama hingga saat ini. Pada masing-masing zona telah ditentukan beberapa kecamatan yang bisa mendaftar di sekolah tersebut. Pembagian zona dan kecamatan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut rincian pembagian zona sekolah dan kecamatan di Kota Malang: Zona 1 yang meliputi SMAN 4, SMAN 5, SMAN 7. (2) Kecamatan yang tergabung dalam zona ini adalah Blimbing, Klojen, Lowokwaru, Sukun, dan Wagir (Kabupaten Malang). Zona 2 yang terdiri atas SMAN 1, SMAN 8, SMAN 9. Kecamatan yang tergabung dalam zona ini adalah Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, Dau, Karangploso, dan Singosari. Tiga nama kecamatan terakhir dari wilayah Kabupaten Malang. Zona 3 yang mencakup

---

SMAN 2, SMAN 3, SMAN 6, SMAN 10. Kecamatan yang tergabung dalam zona 3 yakni Kedungkandang, Klojen, Sukun, Tajinan (Kabupaten Malang), dan Pakis (Kabupaten Malang).

Dalam proses PPDB, peserta didik mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju secara online. Disana peserta didik akan mengisi data diri secara lengkap dan memilih SMA yang diinginkan. Secara otomatis sistem akan mengecek berdasarkan perhitungan jarak. Pengukurannya menggunakan geospasial dengan metode point to point menggunakan aplikasi Google Maps. Peserta didik diharuskan mendaftar ke sekolah sesuai dengan zona diatas sesuai dengan jarak yang terdekat dengan domisilinya. Domisili yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang sudah diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum PPDB dibuka. Apabila terdapat permasalahan dengan KK, peserta didik dapat menggunakan durat domisili yang telah diterbitkan oleh RT atau Ketua RW yang telah dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa. Kurun waktu yang diterima dalam pengajuan menggunakan surat domisili ini ialah paling singkat peserta didik telah berdomisili 1 tahun sejak diterbitkannya surat domisili dan sebelum pendaftaran PPDB dibuka.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah tentu tidak serta merta mampu diterima oleh masyarakat. Pada awal penerapannya terjadi banyak sekali konflik yang menentang kebijakan PPDB Zonasi ini di terapkan dengan prosentase yang sangat tinggi. Terjadi demo yang dilakukan oleh para wali murid di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Malang. Mereka tidak terima akan kebijakan tingginya prosentase jatah zalur zonasi. Hal tersebut dikarenakan para orangtua menganggap dengan tingginya prioritas jalur zonasi, maka kemampuan siswa disini tidak lagi diperhatikan dan menurunnya kualitas sekolah. Banyak pihak yang mendukung untuk dadakannya himbauan ulang terkait dengan kebijakan tersebut, salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Tela'ah Informasi Regional Malang (LSM Pattiro Malang).

PPDB memiliki salah satu tujuan untuk pemerataan pendidikan agar seragam. Keberagaman sekolah memunculkan presepsi baru dalam masyarakat, yakni mengenai "Sekolah Favorit" dan Sekolah Non-Favorit". Dikotomi mengenai "Sekolah Favorit" dan "Sekolah non-Favorit" memang bukanlah fenomena baru. Perspektif "Sekolah Favorit" di masyarakat sangat beragam dan kompleks. Pada umumnya perpektif sekolah favorit berdasarkan penilaian masyarakat yang diberikan kepada suatu sekolah yang dianggap mumpuni dalam segala hal selama proses pendidikan itu berlangsung. Salah satu hal yang mendasari sekolah menyandang label "Sekolah Favorit" adalah asal-muasal sekolah tersebut yang memiliki visi dan misi yang kuat, dikembangkan secara profesional agar unggul untuk menciptakan output siswa yang cerdas. Dengan demikian, sekolah itu dipercaya dan didatangi masyarakat. Orangtua beranggapan kalau anaknya bisa bersekolah di sekolah favorit hal itu akan menjanjikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Sekolah favorit tercipta karena beberapa hal. Salah satunya adalah standarisasi penerimaan siswa yang tinggi dibandingkan dengan sekolah lainnya. Selain standart umum, sekolah "favorit" juga menggunakan persyaratan lain PPDB yang umumnya tidak dimiliki oleh sekolah lain, seperti psikotes dan penilaian non akademik lainnya. Dalam kaca mata lingkungan sosial, "sekolah favorit" menjadi semacam pendongkrak status sebuah sekolah yang tentu saja menyangkut para siswa, para pengajar, dan fasilitasnya. Lingkungan sosial sekolah favorit dikenal sebagai lingkungan sekolah yang sangat bagus dan berkualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor input siswanya sebagai salah satu barometer. Berdasarkan dari segi sumberdaya tenaga pengajar, sekolah favorit dianggap memiliki pengajar yang lebih berkualitas dibandingkan sekolah lain. Input dari "sekolah favorit" adalah siswa-siswa dengan kualitas yang baik, demikian pula dengan tenaga kerja dan pengajar di sana.

Pembentukan stigma 'Sekolah Favorit' tidak hanya tercipta sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat. Pemerintah memiliki andil dalam terciptanya presepsi tersebut. Setiap tahun pemerintah memberikan ranking sekolah-sekolah di tiap jenjang pendidikan. Ranking tersebut diambil berdasarkan nilai UTBK dari seluruh siswa yang ada di setiap kota di setiap jenjangnya. Keterlibatan pemerintah dalam menciptakan stigma "Sekolah Favorit" dan "Sekolah Tidak Favorit" tidak sampai disitu saja.

---

Pemberian ranking sekolah ini berpengaruh pada akreditasi sekolah. Akreditasi merupakan sebuah penilaian kelayakan program/satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat (22).

Akreditasi dianggap penting bagi perkembangan sekolah. Status akreditasi akan menjadi modal sosial sekolah. Maka, tidak mengherankan apabila sekolah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Untuk mencapai akreditasi yang baik, sekolah memerlukan waktu dan proses yang panjang. Ada empat 4 komponen utama yang termasuk dalam penilaian, yaitu Mutu Lulusan, Mutu Sekolah, Proses Pembelajaran, dan Manajemen Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak mengherankan apabila sekolah berupaya semaksimal mungkin, salah satunya dengan menerima siswa-siswa yang dianggap 'berbobot', yang dianggap memiliki kemampuan akademik yang bagus. Input siswa mempengaruhi prestasi kumulatif sekolah. Akreditasi sekolah dan ranking UTBK yang bagus merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah juga terlibat dalam pembentukan stigma "Sekolah Favorit" dan "sekolah non-Favorit".

Kebijakan PPDB memiliki beberapa dampak yang dirasakan oleh siswa. Pertama demotivasi belajar. Sejak munculnya kebijakan PPDB jalur zonasi yang dominan, "Nilai" dianggap sudah tidak penting lagi. Prioritas diterimanya siswa ialah titik koordinat tempat tinggal ke sekolah. Banyak siswa enggan untuk terlalu memaksakan diri untuk belajar agar mendapatkan nilai yang baik. Bagi mereka saat ini nilai sudah tidak penting lagi. Tidak mengherankan apabila mereka sudah tidak berlomba-lomba untuk belajar dan mendapatkan nilai raport yang baik. Mereka hanya mengikuti alur pembelajaran yang ada di sekolah, tidak ada lagi motivasi untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai yang baik.



Gambar 1: Contoh kutipan curhatan siswa di salah satu akun media sosialnya

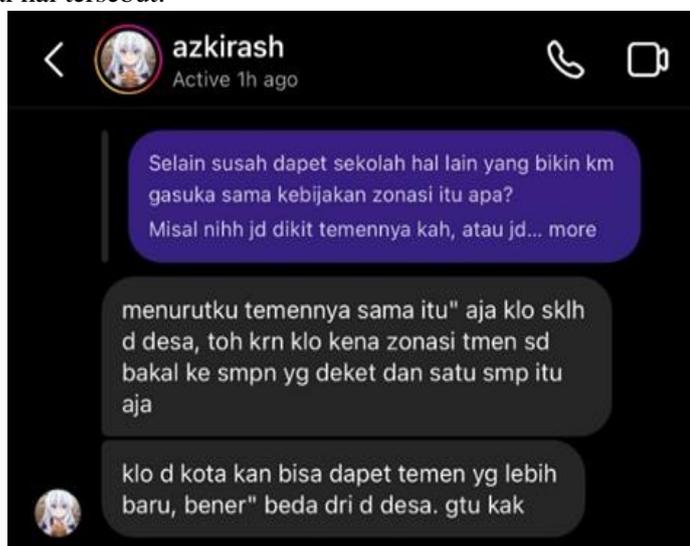
Sekilas dapat dilihat bahwa banyak siswa yang mulai kehilangan semangat belajar (demotivasi belajar). Mereka menganggap nilai sudah bukan lagi sebuah prioritas utama, yang penting sekolah. Beberapa siswa yang merasa keberatan dengan kebijakan ini, mereka sudah tidak lagi menganggap 'nilai' sebuah hal yang penting atau prioritas, karena saat ini yang terpenting adalah jarak. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan yang ada sebelumnya. Selama ini seperti yang kita tahu bahwa 'Nilai' merupakan tolok ukur kegagalan dan keberhasilan siswa. 'Nilai' merupakan sebuah bentuk atas usaha yang dilakukan seorang siswa di sekolah. 'Nilai' merupakan bentuk pencapaian yang dianggap sebagai bukti bahwa seorang siswa telah melakukan upaya terbaiknya di sekolah. 'Nilai' pulalah yang menjadi suatu penanda keberhasilan dan kegagalan siswa di sekolah.

Dampak yang kedua adalah tekanan psikologis di dalam kelas yang heterogen. Dilihat dari pengalaman masa lalu, sebelum diterapkannya kebijakan ini suatu sekolah yang dianggap 'favorit' terbentuk berdasarkan komposisi siswa di dalamnya. Siswa-siswi yang ada di dalam kelas tersebut merupakan siswa-siswa yang lolos seleksi berdasarkan nilai akademik maupun non-akademik dengan standart yang telah ditetapkan oleh suatu sekolah. Dengan demikian komposisi siswa yang ada di kelas tersebut adalah siswa-siswa yang memiliki penilaian terbaik sesuai standart sekolah. Kemampuan

akademik dan non-akademik yang dimiliki antara siswa satu dengan siswa lainnya dapat dikatakan sejajar atau tidak jauh berbeda. Komposisi siswa yang sedemikian rupa menciptakan lingkungan belajar yang seimbang pula. Adanya zonasi ini membuat guru harus beradaptasi ulang dengan sistem mengajar mereka. Guru harus melakukan evaluasi dan penyesuaian ulang untuk mengajar di dalam kelas. Guru yang tadinya mengajar di sekolah favorit dengan komposisi siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan setara, dapat mengajar siswa-siswanya dengan metode yang praktis namun materi tetap bisa ditangkap oleh siswa. Dalam hal ini guru merasa ia tidak perlu berupaya keras agar siswanya dapat memahami materi. Dengan demikian, pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Berbeda halnya dengan kebijakan baru PPDB. Siswa yang diterima di sekolah yang tadinya dianggap sebagai 'Sekolah Favorit' merupakan siswa-siswa yang mayoritas lolos berdasarkan jarak tempat tinggal, bukan melalui standart nilai sekolah. Diterapkannya kebijakan PPDB membuat komposisi kelas berbeda. Guru harus menyesuaikan kembali sistem pengajarannya agar materi dapat diterima oleh seluruh siswa, baik siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi maupun rendah. Penyerapan materi antara siswa dengan kemampuan akademik tinggi dan rendah jelas berbeda. Hal tersebut mengharuskan guru untuk bekerja lebih keras agar dapat beradaptasi dengan seluruh kalangan siswa. Guru harus menciptakan kiat dan strategi mengajar yang tepat dan sesuai dengan peninjauan karakteristik perbedaan peserta didik.

Dampak yang ketiga adalah tekanan psikososial baik di sekolah maupun di rumah. Kebijakan ini menciptakan sebuah lingkungan sosial terbatas. Pertemanan siswa dominan sama dengan pertemanan di sekolah sebelumnya dan di lingkungan rumahnya. Siswa akan bertemu dengan teman-teman yang ditemuinya di sekitar tempat tinggalnya atau yang bahkan sudah di kenal sebelumnya karena mereka bertetangga. Hal tersebut akan memberikan rasa jenuh dan kurang menarik karena tidak terbentuknya lingkungan sosial yang baru. Padahal di usia ini, para siswa memasuki tahapan yang penting untuk menciptakan lingkungan sosial baru, meningkatkan ambisi belajar dan bersosialisasi dengan orang-orang baru untuk bekal masa depannya. Anak yang berteman dengan orang-orang baru yang belum pernah ditemui sebelumnya dapat membuka wawasan dan sudut pandangnya. Berikut salah satu pendapat siswa mengenai hal tersebut:



Gambar 2: Wawancara pribadi peneliti dengan informan

Pembentukan karakter dan psikososial siswa tidak hanya terbentuk melalui lingkungan sekolah. Lingkungan rumah anak juga mempengaruhi hal tersebut. Orangtua memiliki pemikiran yang berbeda terhadap suatu sekolah. Hingga saat ini masih banyak orangtua yang memiliki pandangan ideal mengenai sekolah menurut versinya. Banyak orangtua yang mendorong anaknya agar lolos di sekolah favorit melalui jalur prestasi. Berbagai upaya dilakukan orangtua sebagai bentuk dukungan untuk anaknya agar dapat bersekolah di sekolah yang dianggapnya bagus. Tuntutan inilah yang dimaksud

tekanan psikosial secara internal. Pada saat orangtua menuntut anaknya untuk bersekolah di sekolah tertentu, secara tidak langsung akan memberikan tekanan terhadap anak. Mereka akan merasa terbebani dan timbul rasa takut gagal.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan 2020 Dan Jumlah Sekolahnya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sekolah Menengah Atas
1	Kedungkandang	207.428	SMA 6, SMA 10
2	Sukun	196.300	
3	Blimbing	182.331	
4	Lowokwaru	163.639	SMA 7, SMA 8, SMA 9
5	Klojen	94.112	SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5

Dampak yang lainnya adalah tantangan tersendiri untuk siswa yang tinggal di pinggiran kota. Dilihat secara geografis, data persebaran lokasi sekolah negeri yang ada di Indonesia tidak tersebar secara merata. Di kota Malang sendiri jumlah sekolah negeri baik jenjang SD-SMP-SMA di beberapa kecamatan tidak sebanding dengan jumlah kepadatan penduduk di lokasi tersebut. PPDB jalur zonasi kurang menguntungkan untuk siswa-siswa yang bertempat tinggal di daerah pinggiran. Dikutip dari Badan Pusat Statistik 2020, Kota Malang memiliki 5 kecamatan.

Berdasarkan paparan data di atas, Kedungkandang menduduki peringkat pertama dan Sukun menduduki peringkat kedua dengan wilayah terluas dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Di sisi lain dalam tabel SMA Negeri, Kedungkandang hanya memiliki 2 sekolah negeri, dan Sukun tidak memiliki sekolah negeri sama sekali. Hal ini merupakan bukti bahwa pada dasarnya jumlah sekolah yang ada di kota Malang belum merata. Perlu usaha dan penyesuaian agar kebijakan PPDB jalur Zonasi tetap bisa berjalan dengan baik di Kota Malang. Sebenarnya hal ini telah dilakukan, yaitu dengan pembagian zona untuk setiap kecamatannya. Namun, hal tersebut masih kurang optimal dikarenakan persaingan itu sendiri juga terjadi dengan siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Dari ke 10 sekolah di atas, 5 di antaranya menduduki peringkat sekolah menengah atas terbaik di Malang dan merupakan sekolah-sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit di masyarakat. Sudah dapat dipastikan akan ada banyak siswa yang memperebutkan kursi di sekolah tersebut, baik melalui jalur prestasi maupun jalur zonasi.

Pemerintah berharap zonasi mampu membantu orangtua untuk mengontrol kehidupan sosial putra-putrinya. Memang inilah salah satu tujuan dibentuknya kebijakan ini. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini di Indonesia, termasuk Kota Malang sendiri banyak sekali siswa yang mengendarai kendaraan bermotor untuk ke sekolah meskipun masih di bawah umur. Harapannya dengan kebijakan PPDB ini mampu meminimalisir hal tersebut. Hal ini tentu akan lebih susah untuk siswa yang tinggal di pinggiran. Siswa-siswa yang tinggal di pinggiran, tidak ada akses fasilitas publik seperti angkutan umum. Mereka hanya memiliki opsi untuk diantar orangtua ataupun naik ojek online. Berbagai upaya dilakukan siswa untuk beradaptasi dengan kebijakan ini untuk mencapai sekolah ideal menurut versinya. Mengupayakan jalur prestasi merupakan salah satunya. Untuk memaksimalkan hal tersebut siswa memilih untuk bergabung dengan LBB (Lembaga Belajar Mengajar) agar nilai rapotnya bagus. Nilai itulah yang nanti dapat membantunya untuk lolos jalur prestasi. Pemilihan sekolah untuk jenjang SMA harus dipilih dengan baik karena jenjang SMA dianggap merupakan jenjang yang cukup krusial dan menentukan. Pilihan lainnya adalah pasrah dan mengiuti aturan zonasi atau dengan cara lain mendaftar ke sekolah kejuruan.

Orangtua memiliki prespektif tersendiri terhadap PPDB Zonasi. Mereka merasa bahwa PPDB Zonasi dianggap kurang adil untuk siswa, terutama untuk siswa-siswa yang memang berprestasi. Perubahan kebijakan zonasi inilah yang memicu terjadinya protes yang dilakukan orangtua karena tidak terima dan menganggap bahwa kebijakan baru tersebut merugikan. Tidak heran apabila ketika PPDB jalur zonasi diterapkan sebanyak 80% orangtua yang melakukan demonstrasi di depan gedung Dinas Pendidikan Kota Malang. Pada saat kebijakan PPDB telah mengalami evaluasi, salah satunya dengan

---

penurunan prosentase penerimaan berdasarkan jalur zonasi, masyarakat mulai menerima kebijakan tersebut meskipun terkesan pasrah dan berat hati. PPDB dalam prosesnya menggunakan sistem online. Hal tersebut menjadi tantangan baru bagi orangtua yang kolot dan gagap teknologi.

Faktor utama orangtua dalam memilih sekolah untuk anaknya adalah kualitas sekolah. Menurut mereka sekolah yang baik akan memberikan putra/putrinya pendidikan yang baik pula. Orangtua juga mengharapkan agar sekolah bermutu mampu memberikan putra/putrinya pengajaran yang tepat dan penyampaian materi yang optimal. Dengan demikian, putra-putrinya akan mendapatkan pendidikan yang bermutu. Selain itu, lingkungan di sekolah yang berkualitas merupakan lingkungan yang sehat dan bermutu. Kualitas sekolah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan pendidikan. Dengan adanya pertimbangan ini harapannya adalah pada hasil akhir. Ketika seorang anak bersekolah di sekolah yang berkualitas, harapan orangtua ialah output sang anak ketika telah menyelesaikan sekolahnya. Hal itu dianggap sebagai dasar yang baik untuk masa depan anak supaya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (universitas) yang bagus atau untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Contohnya seperti Bu Siska, salah satu orang tua dan informan dalam penelitian ini. Bu Siska merupakan ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir sarjana, sedangkan Pak Andi selaku suaminya berprofesi sebagai tentara. Orang tua Bima benar-benar mengupayakan semaksimal mungkin agar Bima bisa lolos di sekolah favorit. Bahkan mereka juga memberikan fasilitas kursus diluar jam sekolah untuk mendukung putranya. Pak Andi sangat ingin Bima masuk ke SMAN 5 Malang Jurusan IPA agar nanti dapat masuk ke Perguruan Tinggi yang baik dengan Jurusan Kedokteran. SMAN 5 Malang menjadi pertimbangan dikarenakan sejauh yang ia ketahui SMAN 5 Malang merupakan sekolah yang sangat bagus karena memiliki dan telah memenangkan berbagai penghargaan, selalu menduduki juara 10 besar sekolah dengan rata-rata Nilai Ujian Nasional tertinggi.

Faktor lainnya dalam penentuan pengambilan keputusan untuk pendidikan anak ialah ekonomi, atau modal yang dimiliki orangtua. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang memiliki dampak pada berbagai kehidupan manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan bahwa ekonomi akan selalu terlibat baik dalam lingkup sosial, politik, hukum, bahkan tidak terkecuali dalam lingkup pendidikan. Dalam pemilihan pendidikan anak, orangtua kerap kali memperhitungkan segala sesuatunya termasuk ekonomi terkait biaya SPP. Untunglah, belakangan ini pemerintah telah memberikan bantuan Pendidikan dan membebaskan orangtua dari beban SPP. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan karena adanya 'biaya lain-lain' yang timbul selama proses pendidikan berlangsung. Contohnya kebutuhan akan buku-buku, seragam, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kebutuhan gadget seperti ponsel dan laptop sebagai piranti atau fasilitas utama Pendidikan di era digital saat ini. Banyak kasus di Indonesia terjadi bahwa anak tidak mendapat akses Pendidikan karena factor ekonomi orangtua. Contohnya seperti Pak Anwar salah satu informan penelitian ini. Penghasilannya yang pas-pasan digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dan adik-adiknya yang masih menempuh jenjang pendidikan.

Di tengah gencarnya peraturan zonasi, banyak orangtua tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar anaknya tetap dapat bersekolah di sekolah yang dianggap favorit. Salah satu cara adalah dengan mengupayakan jalur prestasi dan mendukung kegiatan anaknya untuk belajar di luar jam sekolah. Mulai dari memfasilitas kebutuhan sekolah seperti wifi dirumah, gadget pribadi, laptop atau computer, bimbel online ketika masa Covid-19, memasukkan anak ke Lembaga Belajar, pemantauan pendidikan, hingga merencanakan pilihan sekolah lanjutan. Hal tersebut dilakukan karena mereka percaya bahwa hal-hal tersebut dapat membantu mempersiapkan masa depan putra putrinya. Bahkan ada beberapa orangtua yang sudah memutuskan anaknya harus bersekolah di SMA dengan jurusan tertentu dan lanjut ke Universitas dengan jurusan yang sudah di harapkan pula. Terdapat juga beberapa orang tua yang lebih memilih anaknya untuk lanjut masuk SMK, dengan harapan setelah lulus lebih cepat mendapat kerja dibanding harus SMA yang harus lanjut ke jenjang pendidikan perguruan tinggi.

Bagian hasil dan pembahasannya berisi temuan penelitian yang didapatkan dari data penelitian dan berkaitan dengan hipotesis serta diskusi hasil penelitian dan perbandingan dengan teori dan atau

---

penelitian sejenis. Bagian hasil dan pembahasan tidak dibagi menjadi beberapa sub bagian, silahkan sampaikan hasil dan langsung membahas judul.

### Simpulan

Kebijakan PPDB memiliki beberapa dampak yang dirasakan oleh siswa, mulai dari demotivasi belajar, tekanan psikologis di dalam kelas yang heterogen, tekanan psikososial baik di sekolah maupun di rumah, serta tantangan tersendiri untuk siswa yang tinggal di pinggiran kota. Berbagai upaya dilakukan siswa untuk beradaptasi dengan kebijakan ini untuk mencapai sekolah ideal menurut versinya. Mengupayakan jalur prestasi merupakan salah satunya. Untuk memaksimalkan hal tersebut siswa memilih untuk bergabung dengan LBB (Lembaga Belajar Mengajar) agar nilai rapotnya bagus. Nilai itulah yang nanti dapat membantunya untuk lolos jalur prestasi. Orangtua juga memiliki banyak pertimbangan dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya, mulai dari kualitas sekolah, harapan output, hingga ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan pengambilan sekolah. PPDB selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Transisi inilah yang mengharuskan orangtua berjuang keras agar lebih memahami sistem kebijakan pendidikan yang ada. Kendala yang dihadapi orangtua lainnya adalah banyak orangtua yang tidak paham teknologi, padahal untuk proses PPDB saat ini sepenuhnya dilakukan online. Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi yang didapat orangtua untuk lebih memahami sistem pendidikan yang sedang berlaku.

### Referensi

- Aulia, S. (2012, Januari-Maret). *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)*. Jurnal Politik Muda, 2(1), 204-216.
- Bintoro, R. F. (2018). *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PSBB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda*. Jurnal Riset Pembangunan, 1(1), 48.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (2017). *Reproduction in Education, Society and Culture*. In S. I. Dwiningrum, *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan* (p. 183). Yogyakarta: UNY Press.
- BPPN. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
- Dwiningrum, S. I. (2017). *Sosiologi dan Antropologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Emzir. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habibah, S. (2017, 04 17). *Teknologi, Implikasi Filsafat Ilmu Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan. DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora*, 4(1), 166-180. Retrieved from <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/693>
- Kemendikbud. (2019, Juni 14). *PPDB Kemendikbud*. Retrieved from Kemendikbud Website: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/06/tiga-jalur-ppdb-2019-zonasi-prestasi-perpindahan-orang-tua>
- Kewuel, Hipolitus Kristoforus (2014). *Sistem Pendidikan Nasional dan Kurikulum Dalam Perspektif Filsafat Antropologi*, Erudio (Journal of Educational Innovation), Volume 2, Nomor 2
- Kewuel, Hipolitus, Kristoforus (2017). *Analisis Antropologi Pendidikan tentang Penguatan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi, dalam Tata Pendidikan Tinggi*. Erudio (Journal of Educational Innovation), Volume 3, Nomor 2
- Laksono, P. (2016). *Antropologi Pendidikan, aneh: biasanya tidak apa-apa*. Yogyakarta: Kepel Press. Universitas Gajah Mada.
- Mahmud, & Suintana, I. (2012). *Antropologi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Martono, N. (2014). *Dunia Lebih Indah Tanpa Sekolah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta: UIP.
- Reed-Danahay, D. (1996). *Education and Identity in Rural France: The Politics of Schooling*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Setiawan, Y. (2016, September 16). PSMK kemendikbud. Retrieved from PSMK Kemendikbud Website: <https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip>
- Tilaar, H. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yuristia, A. (2017, Januari). *Keterkaitan Pendidika, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi, dan Pembangunan*. Ijtimaiyah: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 1(1).